

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI UTARA

ANALYSIS OF BUDGET REALIZATION PRESENTATION REPORT ON DEPARTMENT OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES NORTH SULAWESI PROVINCE

oleh:

Eduard Junior Garry Santie¹

Jantje J. Tinangon²

Lidia M. Mawikere³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹Garry.santie@yahoo.com

²jantje788@gmail.com

³lidiamawikere76@gmail.com

Abstrak: Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan panduan bagi Pemerintah pusat maupun daerah dalam menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah pusat dan daerah dapat diperbandingkan dan dipahami sama oleh para penyaji laporan dengan pembaca laporan. Laporan keuangan merupakan pertanggung jawaban Pemerintah pusat/daerah dalam merealisasikan anggaran yang telah diberikan dan digunakan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta gambaran yang jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Sulawesi Utara telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan khususnya pada laporan realisasi anggaran. Sebaiknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara bisa lebih transparansi atau lebih terbuka dalam memberi atau membagi informasi mengenai laporan keuangannya.

Kata kunci: penyajian, laporan, dan LRA PP no. 71 tahun 2010

Abstract: Government Accounting Standards is a guide for central and local government in presenting the financial statements. Accounting standards is necessary for the financial statements produced by the central and local governments can be compared and understood by the presenters and the report readers. Financial report is the accountability for central local government in the realization of budget that has been given and are used properly. This study aimed to analyze the Regional Budget Realization Statements based on Government Regulation No. 71 Year 2010. The analytical method used is descriptive analysis method in which the research is done by collecting and analyzing the collected data and clear image in accordance with the actual situation. These results indicate that the Department of Energy and Mineral Resources in North Sulawesi province has been guided by the Government Regulation No. 71 Year 2010 in presenting the financial statements, especially on budget realization report. It is recommend that the Department of Energy and Mineral Resources of North Sulawesi Province can be more transparence or more open in giving or share the information of its financial statements

Keywords: presentation of the report , and the LRA PP 71 year 2010

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan keuangan daerah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Laporan keuangan inilah yang akan dijadikan salah satu pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintah daerah yang digunakan oleh pihak luar (DPRD dan masyarakat) dalam rangka pengambilan keputusan dan menilai penyelenggaraan Pemerintah daerah. Peranan laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Organisasi yang bergerak di bidang pertambangan umum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga menerapkan mekanisme pencatatan dan Pengelolaan keuangan termasuk di dalamnya membahas tentang anggaran. Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan penetapan anggaran tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program-program yang akan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Semua program ini membutuhkan biaya untuk menunjang program ini untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut.

Sumber-sumber dana yang diperoleh untuk merealisasikan anggaran belanja yang dibutuhkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Soemarso (2004:3) mendefinisikan, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan keuangan. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan menyediakan informasi melalui proses pencatatan dan pengukuran sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam penyajian laporan.

Akuntansi Keuangan Daerah

Bastian (2006:15) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada Pengelolaan dana masyarakat. Darise (2009:77) mendefinisikan akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan, transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal. Akuntansi pemerintahan di definisikan juga sebagai proses pencatatan, pengumpulan dan pembelanjaan sumber-sumber keuangan pemerintah dan pembuat laporan keuangan yang terkait dengan beberapa atau semua kegiatan operasional dengan hasilnya. Akuntansi sektor publik dapat disimpulkan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di antaranya, pemerintah

daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut :

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Substansi mengunggul bentuk formal
- e. Prinsip Periodisitas
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Pengungkapan Lengkap
- h. Penyajian Wajar

Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Negara

Pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Ada beberapa macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry* dan *tripel entry*. Sistem pencatatan *single entry* sering disebut dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Sistem pencatatan *double entry* sering disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan menjurnal, karena dalam pencatatan ini ada sisi Debit dan Kredit.

Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur dan menggambarkan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. PP nomor 71 tahun 2010, menyatakan laporan keuangan disusun menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan daam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Periode pelaporan laporan realisasi anggaran disajikan sekkurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan sutau entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebuah panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi.

Penelitian Terdahulu

Lanny (2012), melakukan penelitian mengenai Analisis Pengakuan dan Pelaporan atas Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Manado. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan membandingkan proses pengakuan dan pelaporan atas laporan keuangan yang diterapkan. Bila dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Untuk persamaan peneliti ini dengan peneliti penulis keduanya meneliti penggunaan laporan realisasi anggaran. Dan untuk perbedaannya, mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005, sedangkan penulis mengacu pada PP No. 71 tahun 2010.

Marcelino (2013), melakukan penelitian tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam penelitian ini, data yang digunakan juga bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kinerja realisasi APBD Pemerintah. Bila dibandingkan dengan penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini keduanya meneliti penggunaan laporan realisasi anggaran. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu ada beberapa perhitungan yang dipakai oleh peneliti untuk nantinya membantu dalam proses menganalisis kinerja realisasi APBD Kabupaten Minahasa Tenggara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indriantoro & Supomo, 2012 : 26).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara, dengan waktu penelitian kira-kira selama 3 bulan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan masalah yang ditemui untuk kemudian dapat diteliti dan dicari solusinya.
2. Mengajukan Permohonan Penelitian dengan cara memasukan surat permohonan penelitian dengan persetujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melakukan penelitian pada objek atau instansi yang dipakai dalam penyusunan skripsi.
3. Disposisi Pimpinan Instansi yaitu setelah pemasukan surat permohonan penelitian, Bidang Umum dan Kerjasama, menindak lanjuti pembuatan surat perintah yang menjelaskan tentang izin penelitian pada instansi tersebut dengan persetujuan pimpinan instansi.
4. Pengumpulan informasi dengan mencari berbagai literatur dari berbagai sumber, seperti di perpustakaan, yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas oleh peneliti, demi lancarnya proses penyusunan skripsi ini. Juga, melalui media elektronik, berupa akses data dalam internet untuk melengkapi teori-teori yang ada untuk lebih memahami permasalahan yang ditemui.
5. Mencari data secara langsung yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Manado.
6. Melakukan penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya dan mengkaji kembali apakah sesuai dengan teori-teori yang telah ada.
7. Menarik kesimpulan serta memberikan saran dari penulis sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan, apakah permasalahan yang telah dibahas tersebut memiliki dampak baik perusahaan itu sendiri.
8. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan tahun 2013 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Kuncoro (2009:145), mendefinisikan data sebagai sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Soeratno (2008:67), jenis data dapat dibedakan menjadi dua jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan kedua jenis data yang telah dikemukakan di atas yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu berisi mengenai profil dan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan data kuantitatif berupa data yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terdapat dalam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indriantoro & Supomo 2012 : 146). Dalam hal ini data primer didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara secara langsung ditempat penelitian.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro & Supomo 201:147).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 2010:401). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum objek penelitian.
2. Mengadakan tatap muka dan Tanya jawab dengan pihak pemerintah yang bersangkutan.
3. Mempelajari laporan keuangan pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.
4. Mempelajari aktivitas dalam Dinas Energi dan Sumber daya Mineral.

Metode Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa adalah Metode Deskriptif. Metode Deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai keadaan yang sebenarnya.

Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka penulis berusaha menjelaskan judul penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Penyajian adalah suatu proses, dan cara untuk menyediakan menyampaikan suatu laporan. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyajian laporan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara menyajikan informasi berupa laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara dan dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara juga menyajikan informasi tentang laporan keuangan serta laporan realisasi anggaran terhadap seluruh transaksi dalam satu periode pelaporan.

Berikut adalah tabel Jurnal Belanja Tidak Langsung Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 :

Tabel 1. Jurnal Laporan Realisasi Anggaran

No.	Transaksi	Jurnal	Debet	Kredit
1.	Program Administrasi Perkantoran	Belanja Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.053.423.350,-	Rp. 1.053.423.350,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belanja Modal Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.573.932.500,-	Rp. 2.573.932.500,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 34.300.000,-	Rp. 34.300.000,-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Belanja Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 160.000.000,-	Rp. 160.000.000,-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Belanja Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 62.578.500,-	Rp. 62.578.500,-
6.	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/ Pameran	Belanja Operasi (Bantuan Sosial) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.573.932.500,-	Rp. 2.573.932.500,-
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan	Belanja Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 587.613.000,-	Rp. 587.613.000,-
8.	Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Belanja Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 112.489.955,-	Rp. 112.489.955,-
9.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Belanja Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.426.149.700,-	Rp. 1.426.149.700,-
10.	Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	Belanja Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 644.699.500,-	Rp. 644.699.500,-
11.	Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumber daya Mineral	Belanja Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.248.618.950,-	Rp. 2.248.618.950,-
12.	Program Pembangunan Pengembangan Ketenagalistrikan	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.426.149.700,-	Rp. 1.426.149.700,-
13.	Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumber daya Mineral	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 328.550.000,-	Rp. 328.550.000,-
14.	Program Pembangunan Pengembangan Ketenagalistrikan	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 2.050.777.000,-	Rp. 2.050.777.000,-

Sumber: Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1 menunjukkan kegiatan ataupun program yang telah di jalankan oleh Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Dimana kegiatan atau program tersebut membutuhkan dana untuk merealisasikan program-program tersebut. Program yang banyak membutuhkan dana yaitu program penyelenggaraan hari-hari besar kenegaraan/ pameran yang menggunakan dana sebesar Rp. 2.573.932.500,-. Belanja tidak langsung tersebut telah direalisasikan pada Laporan Realisasi Anggaran seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran

No.	Transaksi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Administrasi Perkantoran	Rp. 857.657.250,-	Rp. 1.053.423.350,-	22,83
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.712.932.500,-	Rp. 2.573.932.500,-	50,26
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 34.300.000,-	Rp. 34.300.000,-	0,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Rp. 160.000.000,-	Rp. 0-	(100)
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp. 62.578.500,-	Rp. 62.578.500,-	0,00
6.	Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kenegaraan/ Pameran	Rp. 0,-	Rp. 68.390.500,-	0,00
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan	Rp. 403.572.000,-	Rp. 587.613.000,-	45,60
8.	Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Rp. 89.110.000,-	Rp. 112.489.955,-	26,24
9.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rp. 1.007.287.800,-	Rp. 1.426.149.700,-	41,58
11.	Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumber daya Mineral	Rp. 2.781.833.950,-	Rp. 2.248.618.950,-	(19,17)
12.	Program Peningkatan Kualitas dan Arus Informasi	Rp. 186.088.500,-	Rp. 162.088.500,-	(12,90)
13.	Program Pembangunan Pengembangan Ketenagalistrikan	Rp. 3.553.830.000,-	Rp. 10.275.715.545,-	189,14
14.	Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral	Rp. 328.550.000,-	Rp. 328.550.000,-	0,00
15.	Program Pembangunan Pengembangan Ketenagalistrikan	Rp. 2.050.777.000,-	Rp. 2.050.777.000,-	0,00
	JUMLAH	Rp. 13.629.327.000,-	Rp. 21.629.327.000,-	58,70

Sumber : Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 2 menunjukkan kegiatan atau program belanja tidak langsung yang telah direalisasikan selama tahun 2013. Sebelum kegiatan atau program tersebut dijalankan telah dilakukan perencanaan anggaran tetapi dalam perrealisasiannya terdapat selisih lebih atau kurang pengeluaran pembiayaan. Anggaran yang ditetapkan

berjumlah Rp. 13.629.327.000,- namun dalam perealisasiannya mengalami perubahan kurang lebih 58,70% dengan total Rp. 21.629.327.000,- Berikut adalah tabel Jurnal Belanja Langsung Berdasarkan PP. No.71 tahun 2010 :

Tabel 3. Jurnal Laporan Realisasi Anggaran

No.	Transaksi	Jurnal	Debet	Kredit
1.	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 5.901.984.774	Rp. 5.901.984.774,-
2.	Gaji dan Tunjangan	Belanja Modal Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 4.387.646.774,-	Rp. 4.387.646.774,-
3.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 3.593.849.000,-	Rp. 3.593.849.000,-
4.	Tunjangan Keluarga	Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 308.873.000,-	Rp. 308.873.000,-
5.	Tunjangan Jabatan	Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 257.930.000,-	Rp. 257.930.000,-
6.	Tunjangan Fungsional	Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,-	Rp. 0,-
7.	Tunjangan Fungsional Umum	Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 149.215.000,-	Rp. 149.215.000,-
8.	Tunjangan Beras	Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 255.711.358,-	Rp. 255.711.358,-
9.	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 80.183.416,-	Rp. 80.183.416,-
10.	Pembulatan Gaji	Belanja Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 62.000,-	Rp. 62.000,-
11.	Tambahan Penghasilan PNS	Belanja Lain-lain Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.514.338.000,-	Rp. 1.514.338.000,-

Sumber : Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara

Table 3 menunjukkan kegiatan belanja langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan belanja langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai, gaji dan tunjangan-tunjangan. Belanja langsung tersebut telah direalisasikan pada Laporan Realisasi Anggaran, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran

No.	Transaksi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 6.311.073.000,-	Rp. 5.901.984.774,-	(6,48)
2.	Gaji dan Tunjangan	Rp.4.654.304.000,-	Rp. 4.387.646.774,-	(5,73)
3.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp. 3.593.849.000,-	Rp. 3.335.672.000,-	(7,81)
4.	Tunjangan Keluarga	Rp. 322.581.000,-	Rp. 308.873.000,-	(4,25)
5.	Tunjangan Jabatan	Rp. 253.822.500,-	Rp. 257.930.000,-	1,62
6.	Tunjangan Fungsional	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0,00
7.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp. 155.093.000,-	Rp. 149.215.000,-	(3,76)
8.	Tunjangan Beras	Rp. 186.447.000,-	Rp. 255.711.358,-	37,15
9.	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	Rp. 142.448.000,-	Rp. 80.183.416,-	(43,71)
10.	Pembulatan Gaji	Rp. 118.000,-	Rp. 62.000,-	(47,46)
11.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 1.656.769.000,-	Rp. 1.514.338.000,-	(8,60)

Sumber: Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 4 dapat diketahui bahwa Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara membagi kegiatan belanja dalam dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dari tabel 4 juga dapat dilihat kegiatan belanja langsung dan tidak langsung dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara dimana nilai ini merupakan nilai yang berhasil direalisasikan selama tahun anggaran 2013. Dari data pada tabel 4 menunjukkan bahwa belanja langsung pada tahun anggaran 2013 mengalami perubahan yang sebelumnya di anggarkan sebesar Rp. 13.629.327.000,- setelah di realisasi mengalami penambahan Rp. 8.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 21.629.327.000,-. Begitu pula yang terjadi pada belanja tidak langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dimana dari anggaran yang sudah di rencanakan mengalami perubahan dan peningkatan dari anggaran yang sudah direncanakan.

Pembahasan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Penyajian adalah suatu proses, dan cara untuk menyediakan menyampaikan suatu laporan. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran terhadap seluruh kegiatan ataupun transaksi yang telah di lakukan. Dimana laporan keuangan mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlihat dari hasil penelitian dan data laporan keuangan dan realisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara sudah mencapai target-target yang telah disepakati serta mengalami peningkatan dari anggaran yang telah atau sudah di tetapkan.

Kinerja keuangan terlihat cukup berhasil karena hampir mendekati target anggaran yang di telah ditetapkan dengan kata lain presentase pencapaian atas realisasi tidak begitu jauh dari yang di anggarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Friska (2015) Pemkot Bitung sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Di lihat dari sisi pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAP Kota Bitung sudah merupakan panutan untuk daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyajian
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara menyajikan Informasi berupa laporan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dan dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab.
2. Laporan realisasi anggaran
Menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan khususnya belanja tidak langsung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara sudah di akui karena sudah terjadinya pengeluaran kas daerah dan telah di realisasikan dalam laporan perubahan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah.

Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara harus lebih transparansi atau lebih terbuka terhadap informasi mengenai laporan keuangan sehingga menjadi panutan bagi dinas-dinas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih dalam laporan keuangannya karena peneliti hanya membahas belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi II. PT Indeks, Jakarta.
- Friska, 2015, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174 Vol.3 No.1 (2015) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=292031&val=1025&title=Analisis%20penerapan%20standar%20akuntansi%20pemerintahan%20berbasis%20akrual%20%20dalam%20penyajian%20laporan%20keuangan%20pada%20pemerintah%20kota%20bitung>. Diakses 23 Juni 2015. Hal. 1-8.
- Indiantoro, Supomo. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPF, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. Penerbitan Erlangga, Jakarta..
- Lanny, 2012. Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporan atas Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Manado. *Skripsi*. (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Hal.59-63.

- Marcelino, 2013. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174 Vol.1 No.3 (2013) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=108891&val=1025>. Diakses 30 Juli 2015. Hal. 82-89.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Soemarso, SR. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. PT. Rimeka Cipta, Jakarta.
- Soeratno, 2008. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Andi, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Kuantitatif*. Edisi Kedua. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

